

MAKALAH
PEMBELAJARAN BERWAWASAN KEMASYARAKATAN

Mata Kuliah : Pendidikan Pengembangan Masyarakat

Semester / Kelas : 6/D

Dosen Pengampu : 1.) Dra. Erni, M.Pd.
2.) Deviyanti Pangestu, M.Pd.



Disusun oleh:
Kelompok 4

Revita Sari	:	2313053113
Irfan Kusuma Yuda	:	2313053118
Novi Susanti	:	2313053124
Riska Listiani Putri	:	2353053008

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan”. Penyusunan makalah ini merupakan salah satu tugas kelompok yang diberikan dalam mata kuliah Pendidikan Pengembangan Masyarakat yang diampu oleh Ibu Deviyanti Pangestu, M.Pd. di Prodi PGSD Universitas Lampung.

Dalam penyusunan makalah ini kami merasa masih banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang kami miliki. Untuk itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.

Dalam penulisan makalah ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada Dosen yang telah memberikan tugas dan petunjuk kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini.

Metro, 7 Maret 2026

Kelompok 4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN.....	3
2.1 Arah Baru Pendidikan Menuju Demokratisasi.....	3
2.2 Konsep Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan.....	6
BAB III	10
PENUTUP.....	10
3.1 Kesimpulan.....	10
3.2 Saran.....	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia serta mempersiapkan masyarakat yang mampu hidup secara demokratis. Seiring dengan perkembangan zaman dan reformasi di Indonesia, sistem pendidikan mengalami perubahan yang mengarah pada demokratisasi pendidikan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan. Hal ini diperkuat melalui kebijakan pemerintah tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pendidikan.

Demokratisasi pendidikan bertujuan menciptakan proses pendidikan yang terbuka, partisipatif, dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Melalui pendidikan yang demokratis, peserta didik diharapkan mampu berpikir kritis, mengambil keputusan secara rasional, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, pendidikan juga perlu dikembangkan melalui pembelajaran yang berwawasan kemasyarakatan, yaitu pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran dengan realitas kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai sumber belajar sekaligus ruang penerapan hasil pendidikan sehingga peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga memiliki kepedulian sosial serta kemampuan berkontribusi dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai arah baru pendidikan menuju demokratisasi serta konsep pembelajaran berwawasan kemasyarakatan menjadi penting untuk dipelajari agar pendidikan dapat berjalan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana arah baru pendidikan menuju demokratisasi dalam sistem pendidikan?
2. Bagaimana konsep pembelajaran berwawasan kemasyarakatan dalam proses pendidikan?

1.3 Tujuan

1. Menjelaskan arah baru pendidikan menuju demokratisasi dalam sistem pendidikan.
2. Mendeskripsikan konsep pembelajaran berwawasan kemasyarakatan dalam proses pendidikan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Arah Baru Pendidikan Menuju Demokratisasi

Reformasi bidang politik di Indonesia pada penghujung abad ke 20 Masehi, telah membawa perubahan besar pada kebijakan pengembangan sektor pendidikan, yang secara umum tertumpu pada dua paradigma baru yaitu otonomisasi dan demokratisasi. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah telah meletakkan sektor pendidikan sebagai salah satu yang diotonomisasikan bersama sektor pembangunan lain yang berbasis kedaerahan. Otonomisasi sektor pendidikan berusaha mengkondisikan sekolah agar kepala sekolah, guru memiliki tanggung jawab besar dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas hasil belajar.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai pengganti Undang-Undang No 2 tahun 1989. Isu penting dalam Undang-Undang tersebut adalah keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sektor pendidikan, sebagaimana tersurat pada pasal 9 bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Pasal ini merupakan kelanjutan dari pasal 4 ayat (1) bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara Demokratis dan berkeadilan. Demokrasi pendidikan merupakan implikasi dari kebijakan yang mendorong pengelolaan sektor pendidikan di daerah, yang implementasinya di tingkat sekolah.

a. Pendidikan dan Kebebasan Politik-Ekonomi

Dalam membangun masyarakat yang demokratis diperlukan pendidikan, agar warga tidak sekedar mampu membaca dan menulis, serta berhitung. Warga perlu memahami fungsi pemerintah yang demokratis sesuai dengan konstitusi dan faham tentang konsep pasar bebas. Kemampuan warga masyarakat akan dua hal ini akan menentukan derajat rasionalitas keputusan yang diambil. Dalam kaitannya dengan pendidikan, pendidikan ekonomi ditekankan pada upaya memfasilitasi setiap peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk mengambil keputusan individual dan pengambilan keputusan secara partisipatif.

Pendidikan yang bersifat demokratis harus memiliki tujuan menghasilkan lulusan yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu menanamkan kesadaran dan membekali pengetahuan akan peran warga dalam masyarakat demokratis.

b. Paradigma Baru Pendidikan

Paradigma baru pendidikan, menuntut agar pendidikan mampu melahirkan manusia demokratis yang akan memerankan dirinya sendiri sebagai anak bangsa dalam proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ternyata pendidikan yang diharapkan sebagai obat mujarab bagi penyakit masyarakat ternyata sudah terkontaminasi oleh virus. Orde baru mengkondisikan pendidikan sebagai instrumen melanggengkan kekuasaan Suharto lewat indoktrinasi politik. Sehingga Kepala Sekolah, Guru dan tenaga kependidikan tidak lagi bersinergi secara profesional, melainkan bekerja berdasarkan instruksi, petunjuk dan arahan. Sekolah bukan lagi wahana yang bersifat demokratis, melainkan merupakan lembaga yang birokratis. Lembaga pendidikan yang anti demokrasi, mustahil akan melahirkan manusia-manusia yang berwatak demokratis. Oleh sebab itu demokratisasi lembaga pendidikan perlu mendapatkan prioritas perhatian. Dengan kata lain reformasi pendidikan yang mendasar atau transformasi pendidikan suatu keharusan yang tidak bisa ditunda lagi.

Ada tiga aspek dasar yang perlu diperbaharui, yaitu regulasi, profesionalitas, dan manajemen. Reformasi tiga aspek ini sangat diperlukan agar dapat menciptakan kondisi sekolah yang memungkinkan peserta didik menjadi dirinya sendiri. Peserta didik dapat menemukan jati dirinya dan bertindak sesuai dengan dirinya sendiri, memenuhi interest dan dapat mengembangkan bakatnya, mampu mengambil keputusan secara rasional untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya dan masyarakat.

1. Kontribusi Pendidikan dalam Demokrasi

Saat ini sebagian masyarakat demokratis diartikan sama dengan masyarakat bebas demonstrasi, yang intinya bebas memaksakan kehendak kelompoknya dengan tekanan kekerasan. Pihak pemerintah karena ketakutan terhadap sorotan dunia internasional, cenderung terbawa arus pemikiran bahwa kebebasan merupakan akar demokrasi yang akan tumbuh dan berkembang secara alami sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Maka pemerintah yang demokratis harus memberikan kebebasan penuh bagi para warga negara untuk menyatakan pendapatnya.

a. Makna Demokrasi

Benyamin Barber dalam bukunya yang berjudul *Aristocracy of Everyone*, menolak pemikiran tersebut dengan menekankan bahwa demokrasi bukanlah bentuk organisasi yang tumbuh secara alami, melainkan tumbuh dan berkembang sebagai hasil usaha keras menggali ide-ide dengan penuh imajinasi. Juga bukan berarti demokrasi, kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan memberikan warga yang tidak terdidik dengan hak untuk ikut mengambil keputusan bersama, sebagaimana hak yang diberikan kepada warga terdidik.

b. Tujuan Pendidikan Demokrasi

Tujuan pendidikan demokrasi adalah mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis, dan berperilaku demokratis. Persoalan yang muncul: mungkin pendidikan demokratis dapat diselenggarakan dalam suasana sekolah yang birokratis, hierarkis-sentralistis dan elitis, seperti sekolah yang ada saat ini? Terselenggara dan keberhasilan pendidikan demokrasi memerlukan reformasi di bidang pendidikan yang berkaitan dengan kebebasan akademik, kebhinnekaan pendidikan, dan perombakan materi pendidikan civics.

2. Sekolah Demokratis

Memasuki abad ke- 21, isu perbaikan pendidikan di Indonesia mencuat ke permukaan, disuarakan oleh semua departemen terkait sebagai otoritas pengelola jalur pendidikan, dan juga para praktisi dan policy maker dalam pembangunan sektor pembinaan sumber daya manusia. Ada beberapa pemikiran pengembangan konteks pendidikan ke depan dalam memasuki abad ke-21 yang membawa berbagai problem ekonomi, sosial dan politik. Pemikiran tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) serta informasi membuat bahan ajar yang harus disampaikan dalam pendidikan menjadi sangat banyak, dikhawatirkan akan membawa stagnasi pengembangan ilmu dan peradaban khususnya pada level pendidikan tinggi. Oleh sebab itu struktur program pendidikan tinggi harus memberikan jaminan Pemberian reward dan insentif yang memadai terhadap pengembangan ilmu dan teknologi.
- b. Perkembangan teknologi yang terus-menerus dapat terjadi dengan akselerasi tinggi yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi melalui industri dan jasa. Oleh sebab itu pendidikan harus mampu menjembatani antara sektor kerja dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

- c. Setiap negara akan saling tergantung pada sektor ekonomi, politik, dan IPTEK. Oleh sebab itu Pendidikan harus mampu membuka cakrawala global tersebut dan mampu mengarahkan sikap Multikulturalisme, ketika memasuki pasar tenaga kerja.

Pengembangan sekolah menuju model sekolah demokratis ini relevan untuk dilakukan, dengan berbagai argumentasi, yang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua tipologi sekolah abad ke-21, dan model pembelajaran yang sesuai. Menurut Lyn Hass (1994) menjelaskan bahwa sekolah-sekolah sekarang harus dapat memenuhi beberapa kualifikasi ideal, yaitu:

1. Pendidikan untuk semua; semua siswa mendapatkan perlakuan sama untuk mencapai kompetensi keilmuan, basis skill dan ketrampilan yang ingin dicapai oleh kurikulum.
2. Memberikan skill dan ketrampilan yang sesuai dengan kemajuan teknologi yang menjadi tuntutan pasar.
3. Penekanan pada kerja sama; memberikan pengalaman pada siswa dalam bekerja sama dengan yang lain, melalui penugasan kelompok dalam pembelajaran.
4. Pengembangan kecerdasan ganda; memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan multiple intelligence mereka, dengan memberikan peluang mengembangkan skill dan ketrampilan yang beragam.
5. Integrasi program dengan pengabdian pada masyarakat, agar mereka memiliki kepekaan sosial.

2.2 Konsep Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan

Pembelajaran berwawasan kemasyarakatan merupakan suatu pendekatan pendidikan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi, sumber inspirasi, sekaligus ruang aktualisasi hasil pendidikan, sehingga proses pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan dari guru kepada peserta didik, melainkan sebagai proses transformasi sosial yang secara sadar dirancang untuk membentuk individu yang mampu hidup, beradaptasi, dan berkontribusi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kerangka ini, pendidikan tidak dipandang sebagai institusi yang berdiri terpisah dari realitas sosial, tetapi sebagai bagian integral dari sistem sosial yang terus berkembang dan mengalami perubahan dinamis seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan budaya.

Secara konseptual, pembelajaran berwawasan kemasyarakatan berangkat dari asumsi dasar bahwa setiap individu adalah makhluk sosial yang keberadaannya senantiasa dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga proses pendidikan yang efektif harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan lingkungan tempat peserta didik hidup. Pendidikan yang tidak memiliki keterkaitan dengan masyarakat berisiko melahirkan lulusan yang memiliki kecakapan akademik, tetapi kurang memiliki kepekaan sosial, empati, dan tanggung jawab terhadap persoalan yang berkembang di lingkungannya. Oleh sebab itu, pendekatan ini menekankan pentingnya relevansi antara kurikulum sekolah dengan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga materi pembelajaran tidak bersifat abstrak dan terlepas dari kehidupan peserta didik, tetapi kontekstual, aplikatif, dan bermakna.

Dalam kajian pendidikan kemasyarakatan, dijelaskan bahwa pembelajaran yang berorientasi pada masyarakat harus mampu memberdayakan potensi lokal sebagai sumber belajar yang kaya dan autentik. Lingkungan alam, tradisi budaya, aktivitas ekonomi masyarakat, struktur sosial, serta berbagai persoalan sosial seperti kebersihan lingkungan, kesehatan, gotong royong, hingga dinamika keberagaman sosial dapat dijadikan sebagai konteks pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar secara langsung dari realitas yang mereka hadapi sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi diposisikan hanya sebagai latar belakang sosial, melainkan sebagai laboratorium sosial yang menyediakan pengalaman belajar konkret bagi peserta didik.

Secara filosofis, konsep ini memiliki keterkaitan erat dengan pemikiran progresivisme yang dipelopori oleh *John Dewey*. Dalam karyanya *Democracy and Education* (1916), *Dewey* menegaskan bahwa pendidikan harus berakar pada pengalaman nyata (*experience*) dan bertujuan mempersiapkan individu untuk hidup secara demokratis dalam masyarakat. Pendidikan, menurut *Dewey*, harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas sosial yang bermakna, karena melalui pengalaman sosial itulah individu belajar berpikir kritis, bekerja sama, serta memahami tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Pandangan ini memperkuat gagasan bahwa pembelajaran berwawasan kemasyarakatan menempatkan pengalaman sosial sebagai inti dari proses belajar.

Selain progresivisme, pendekatan ini juga memiliki landasan kuat dalam teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh *Jean Piaget*. *Piaget* (1970) menjelaskan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui proses asimilasi dan akomodasi dalam interaksi dengan lingkungan, sehingga pengalaman nyata memiliki peran penting dalam

pembentukan struktur berpikir individu. Sementara itu, *Vygotsky* (1978) menekankan bahwa perkembangan intelektual sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya, yang ia jelaskan melalui konsep *zone of proximal development*, yaitu jarak antara kemampuan aktual peserta didik dengan potensi perkembangan yang dapat dicapai melalui bimbingan sosial. Dalam konteks pembelajaran berwawasan kemasyarakatan, interaksi peserta didik dengan masyarakat menjadi sarana utama dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna.

Dalam perspektif pendidikan Indonesia, gagasan ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan harus berpijak pada kebudayaan bangsa dan mempersiapkan peserta didik agar mampu hidup sebagai anggota masyarakat yang merdeka dan bertanggung jawab. Konsep “Tri Pusat Pendidikan” yang meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat menunjukkan bahwa proses pendidikan berlangsung secara sinergis di ketiga lingkungan tersebut, sehingga sekolah tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu menumbuhkan karakter, budi pekerti, dan kesadaran sosial peserta didik agar mereka mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungannya.

Dari sisi karakteristik, pembelajaran berwawasan kemasyarakatan memiliki beberapa ciri utama, yaitu:

- a. Bersifat kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata;
- b. Mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan sosial;
- c. Menekankan kolaborasi antara sekolah dan masyarakat;
- d. Berorientasi pada pemecahan masalah sosial;
- e. Mengembangkan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, toleransi, tanggung jawab, dan kepedulian. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik secara seimbang.

Dalam implementasinya, pembelajaran berwawasan kemasyarakatan dapat dilakukan melalui berbagai model pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek sosial, pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*), pembelajaran berbasis lingkungan, kegiatan observasi lapangan, wawancara dengan tokoh masyarakat, hingga kegiatan pengabdian sederhana yang melibatkan peserta didik secara langsung. Melalui strategi tersebut, peserta didik diajak untuk mengidentifikasi masalah di lingkungannya, menganalisis penyebabnya, merancang solusi, dan merefleksikan hasilnya dalam konteks

pembelajaran. Proses ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep akademik, tetapi juga menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kerja sama, serta empati sosial. Menunjukkan bahwa keterkaitan antara materi pembelajaran dengan konteks nyata mampu meningkatkan motivasi belajar, keterlibatan aktif siswa, serta pemahaman konseptual yang lebih mendalam dibandingkan pembelajaran yang bersifat konvensional.

Secara lebih luas, pembelajaran berwawasan kemasyarakatan memiliki implikasi penting terhadap pembentukan karakter peserta didik. Melalui keterlibatan langsung dalam kehidupan sosial, peserta didik belajar menghargai keberagaman, memahami perbedaan, mengembangkan sikap toleransi, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga warga negara yang memiliki integritas moral dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pembelajaran berwawasan kemasyarakatan dapat dipahami sebagai pendekatan pendidikan yang berorientasi pada integrasi antara aspek akademik dan sosial secara menyeluruh, dengan tujuan membentuk individu yang tidak hanya kompeten secara kognitif, tetapi juga memiliki kesadaran sosial, kemampuan adaptasi terhadap perubahan, serta komitmen untuk berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan dalam perspektif ini berfungsi sebagai sarana pemberdayaan individu dan transformasi sosial yang berkelanjutan, sehingga sekolah dan masyarakat menjadi dua entitas yang saling mendukung dalam membangun kualitas kehidupan bersama.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan materi, dapat disimpulkan bahwa arah baru pendidikan di Indonesia mengarah pada demokratisasi pendidikan yang menekankan keterbukaan, partisipasi, serta keterlibatan berbagai pihak dalam proses pendidikan. Demokratisasi pendidikan bertujuan menciptakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta mampu membentuk individu yang berpikir kritis, rasional, dan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, pendidikan juga perlu dikembangkan melalui pembelajaran berwawasan kemasyarakatan, yaitu pembelajaran yang mengaitkan materi pendidikan dengan kehidupan nyata di masyarakat. Melalui pendekatan ini, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran sosial, kepedulian terhadap lingkungan, serta kemampuan untuk berkontribusi dalam memecahkan berbagai permasalahan sosial. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan pemberdayaan masyarakat.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar lembaga pendidikan, guru, serta pihak terkait dapat menerapkan prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan dalam proses pembelajaran sehingga tercipta lingkungan belajar yang terbuka, partisipatif, dan menghargai perbedaan pendapat. Selain itu, guru diharapkan mampu mengembangkan pembelajaran yang berwawasan kemasyarakatan dengan mengaitkan materi pelajaran dengan kondisi nyata di lingkungan masyarakat agar pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna bagi peserta didik. Kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat juga perlu ditingkatkan agar proses pendidikan dapat berjalan secara sinergis dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewey, J. (1916). *Democracy and Education*. New York: Macmillan.
- Fitrianti, L., & Mustika, D. (2024). *Pengaruh Pembelajaran Berbasis Lingkungan terhadap Hasil Belajar IPAS Siswa Kelas IV SD*. Jurnal Basicedu, 8(5), 4290–4298.
- Kumalasari, D. (2010). *Konsep Pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam Pendidikan Taman Siswa*. Jurnal Istorica, 8(1).
- Piaget, J. (1970). *Genetic Epistemology*. New York: Columbia University Press.
- Rosyad, A. M., & Maarif, M. A. (2020). *Paradigma pendidikan demokrasi dan pendidikan islam dalam menghadapi tantangan globalisasi di indonesia*. Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam, 3(1), 75-99.
- Sihono, T. (2011). *Upaya Menuju Demokratisasi Pendidikan*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, 8(1).
- Sugiyar, S. (2017). *Ekosistem Pendidikan: Solusi Demokratisasi Pendidikan*. JALIE: Journal of Applied Linguistics and Islamic Education, 1(2), 209-233.
- Tilaar, H. A. R. (2000). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge: Harvard University Press.